



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DINDIN SOLEHUDIN
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 460487

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/21 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/21 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 1021 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. Tanah Seluas 763 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Bangunan Seluas 54 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 56.000.000

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 33.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 124.941.503

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 580.941.503



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 580.941.503

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.